

**BAB V**  
**PENUTUP**



**A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan di muka, maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan dan pelaporan keuangan PKP-RI Kabupaten Ngawi masih belum sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam PSAK No. 27 tentang akuntansi koperasi. Hal tersebut tampak pada tidak dibuatnya Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota dan Laporan Hasil Usaha yang masih belum lengkap penyajiannya.
2. Laporan Keuangan yang dibuat PKP-RI Kabupaten Ngawi, sebenarnya sudah sesuai dengan pedoman akuntansi koperasi yang disusun oleh Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur, sehingga sudah baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebagian besar pengurus dan anggota belum mengenal adanya standar tentang akuntansi koperasi seperti PSAK No. 27 tentang akuntansi koperasi. Sehingga bisa dimaklumi jika masih ada ketidaksesuaian antara Laporan Keuangan yang dibuat sekarang dengan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 27 tentang akuntansi koperasi. PKP-RI Kabupaten Ngawi dalam membuat Jurnal Khusus sudah baik, disesuaikan dengan kebutuhan yang terjadi.
3. Permasalahan yang sampai sekarang masih dihadapi oleh PKP-RI Kabupaten Ngawi adalah deposito sebesar Rp. 10.000.000,00 yang terdapat di Bank Ratih yang sedang bermasalah. Dan dapat dipastikan bahwa uang

tersebut tidak dapat dikembalikan oleh Bank Ratih, sehingga PKP-RI Kabupaten Ngawi akan mengalami kerugian. Pihak PKP-RI Kabupaten Ngawi tidak membuat rekening kerugian investasi yang dapat digunakan sebagai cadangan jika terdapat investasi yang tidak dapat dikembalikan. Pada PKP-RI Kabupaten Ngawi terdapat juga pinjaman yang tidak bisa dilunasi anggota, tetapi kemungkinan ini sangat kecil yang dilakukan PKP-RI Kabupaten Ngawi terhadap hal tersebut adalah menghapus secara langsung pinjaman yang tidak bisa dilunasi. Akan lebih baik jika PKP-RI Kabupaten Ngawi membuat rekening kerugian piutang meskipun jumlah nilainya kecil.

4. Adanya rekening yang tidak disajikan dalam Neraca yaitu rekening akumulasi penyusutan. Hal ini akan menyebabkan para pemakai Laporan Keuangan tidak tahu berapa besar akumulasi penyusutannya. Dalam Neraca yang disusun oleh PKP-RI Kabupaten Ngawi sebenarnya sudah terlihat adanya akumulasi penyusutan, tetapi akan lebih baik jika dibuat rekening akumulasi penyusutan. Rekening listrik, telepon, air dan rekening RAT juga harus disajikan karena jumlah nilainya besar. Rekening ini untuk mengganti rekening biaya yang masih harus dibayar.
5. Adanya perbedaan penyajian antara Laporan Laba/Rugi yang dibuat PKP-RI Kabupaten Ngawi dengan Laporan Perhitungan Hasil Usaha berdasarkan PSAK No. 27 tentang akuntansi koperasi. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Keterangan	Koperasi	PSAK
1	Istilah	Laporan Laba/Rugi	Laporan Perhitungan Hasil Usaha
2	Item Pendapatan	Terdapat item pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain.	Terdapat item partisipasi anggota dan pendapatan non-anggota.
3	Item Beban	Dibagi menjadi beban organisasi dan pembinaan, beban operasional, beban administrasi dan umum, beban penyusutan.	Disajikan sebagai beban operasi yang tebagi atas beban usaha, beban perkoperasian, beban lain-lain, beban luar biasa.

Dalam penghitungan pembagian Sisa Hasil Usaha pada anggota, PKP-RI Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 31 yang mengatur tentang pembagian Sisa Hasil Usaha. Tetapi PKP-RI Kabupaten Ngawi kurang teliti dalam penghitungan sehingga akan berpengaruh pada SHU yang dibagikan. Adanya perubahan tarif pajak PPh (pajak terutang) juga harus diperhatikan, sehingga SHU tahun 2001 yang dibagikan kepada anggota sekarang berbeda dan mengalami penurunan.

## B. Saran

Ada beberapa saran dari penulis untuk memperbaiki pencatata dan pelaporan keuangan PKP-RI Kabupaten Ngawi, yaitu:

1. Diadakan pendidikan perkoperasian terutama untuk mengenalkan PSAK No. 27 tentang akuntansi koperasi agar kerja koperasi semakin efektif terutama dalam membuat Laporan Keuangannya.
2. Agar dibuat Laporan Arus Kas dan Laporan Promosi Ekonomi Anggota.

3. Sebaiknya dalam menyusun Neraca, disajikan rekening akumulasi penyusutan dan rekening piutang yang berguna untuk mengantisipasi jika ada piutang yang tidak dapat ditagih, seperti yang dialami oleh PKP-RI Kabupaten Ngawi.
4. Sebaiknya dibuat rekening kerugian investasi sebesar Rp. 10.000.000,00 untuk mengatasi masalah deposito yang terdapat di Bank Ratih yang bermasalah. Rekening kerugian investasi dicatat dalam Laporan Laba/Rugi pada pos beban lain-lain.
5. Sebaiknya Jurnal Penerimaan Kas dan Jurnal Pengeluaran Kas dipisah dan sebaiknya PKP-RI Kabupaten Ngawi tidak membuat Jurnal Penjualan Tunai dan Jurnal Pembelian Tunai untuk menghindari pencatatan ganda.
6. PKP-RI Kabupaten Ngawi sebaiknya memperhatikan perubahan tarif pajak PPh Badan (pajak terutang).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al. Haryono Yusuf, 1994, *Dasar-dasar Akuntansi*, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.
- Arief Suadi, 1994, *Akuntansi Keuangan Menengah*, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tahun 1992, Penerbit Eko Jaya, Jakarta.
- Ign. Sukamdiyo, 1997, *Manajemen Koperasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kieso & Weygand, 1995, *Akuntansi Intermediate*, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta.
- Mulyani, 1997, *Sistem Akuntansi*, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 1994.
- Revrisond Baswir, 1997, *Koperasi Indonesia*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Standar Akuntansi Keuangan, 1999, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Suwardjono, 1989, *Teori Akuntansi (Perekayasa-an Akuntansi Keuangan)*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Undang-undang RI No. 25, 1992, *Pokok-pokok Perkoperasian*, Lembaran Negara Republik Indonesia.